

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ali, Muhammad., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty 1988.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2009b.
- , *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harlien Budiono, *Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantar Negara, Masyarakat dan Pasar)*, Renvoi, No. 4.28.III, 3 September 2005.
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

- Logemann dalam Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Pranda media Group, Jakarta, 2014.
- Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu Surabaya, Surabaya, 1985
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo., *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1982.
- Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Pingkan Sundah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sam Ratulangi , Manado, 2014.
- Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Ganesa Indonesia, 1985.
- P.A.F. Lamintang., *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekento, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Tata Hukum*, dalam Miranda.
- Soerodjo, Irawan., *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 2003.

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 1979, Yogyakarta: Liberty
- Salim H.S., *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tedjosaputro, Liliana., *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta : Biograf Publishing, 1995.
- Thong Kie, Tan., *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1996.
- Utrecht dalam Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral (Kesusilaan dalam Teori dan Praktek)*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999.
- Wawan Setiawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara menurut system hukum nasional*, Jakarta, 2 Juli 2001.
- Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yenny Lestari Wilamarta, “Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

